

# **OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KURIKULUM FASILITASI BERBASIS KOMPETENSI PADA FASILITASI PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM MELAKSANAKAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS**

Proposal Perkonsultasian Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan

Oleh: Pirdaus, M.M., M.Pd.  
Widyaiswara Madya LPMP Provinsi Sumatera Selatan

**Abstrak.** Tujuan penulisan artikel ini adalah mendeskripsikan proposal perkonsultasian fasilitasi sebagai rancangan bahan konsultasi berkaitan dengan pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi. Fasilitasi yang dimaksud merupakan fasilitasi yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Selatan, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain. Secara khusus, proposal perkonsultasian fasilitasi ini membahas penerapan model ADDIE untuk mengoptimalkan pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi pada fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas.

**Kata kunci:** *fasilitasi, kompetensi guru, model ADDIE, penelitian tindakan kelas, pengembangan kurikulum fasilitasi.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Republik Indonesia (RI) Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berkaitan dengan kompetensi guru, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dalam Permendiknas di atas diuraikan bahwa seorang guru, termasuk guru mata pelajaran, baik di SMP, SMA, maupun SMK, antara lain dituntut memiliki kompetensi yaitu guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara, guru termasuk dalam jabatan fungsional keahlian. Pasal 69 ayat (3) undang-undang ini menjelaskan tentang kompetensi guru yang meliputi: a) kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis, b) kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan, dan c) kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Peraturan perundang-undangan di atas memberikan amanat bahwa guru harus memiliki kompetensi dan mengembangkan kompetensi mereka secara terus-menerus. Upaya pemenuhan kompetensi guru ini tentu tidaklah mudah mengingat pelaksanaan tugas pokok guru menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan dari dalam dunia pendidikan itu sendiri maupun tantangan dari luar dunia pendidikan. Terlebih lagi dengan upaya pengembangan kompetensi guru, hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi guru.

Pasal 16 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenegpan dan RB) Nomor 16 Tahun 2009 termaktub bahwa untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan

ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, guru wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif. Untuk melaksanakan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, guru dapat melaksanakan pengembangan diri melalui fasilitasi fungsional dan kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru.

Pada Buku 4 Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya, diuraikan bahwa guru yang akan naik jabatan dari Guru Muda golongan III/d ke jabatan Guru Madya golongan IV/a harus dapat mengumpulkan minimal 8 (delapan) angka kredit dari Subunsur Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif. Pada publikasi ilmiah guru minimal harus terdapat 1 (satu) laporan hasil penelitian. Juga diuraikan pada buku itu bahwa karya tulis ilmiah guru dapat dipublikasikan dalam bentuk laporan hasil penelitian, misalnya laporan penelitian tindakan kelas (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).

Pada sisi lain, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 14 Tahun 2015, diuraikan bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi-fungsi, yaitu: a) pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, b) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, c) supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan, d) fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan, e) pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan, dan f) pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Melihat fungsi-fungsi di atas, LPMP Provinsi Sumatera Selatan dapat melakukan berbagai upaya sesuai dengan fungsi fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan. Sebagai contoh yang lebih riil dalam proposal ini, melalui mekanisme kerja sama dengan payung *memorandum of ourstanding*, LPMP Provinsi Sumatera Selatan dapat menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK). Pertanyaannya, mengapa fasilitasi ini?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, berikut ini diuraikan beberapa masalah berkaitan dengan kompetensi guru dalam menulis karya tulis ilmiah, khususnya menulis laporan PTK. Hasil pengamatan dan refleksi pengalaman penulis membimbing guru melaksanakan PTK dalam kurun waktu 4 tahun terakhir di beberapa kabupaten/kota dalam provinsi Sumatera Selatan memberikan beberapa catatan mengenai masalah yang dihadapi guru. Masalah itu antara lain 1) umumnya guru yang mengikuti workshop, bimbingan teknis, atau pelatihan PTK di atas belum pernah melaksanakan PTK, 2) sebagian besar guru belum pernah mengikuti fasilitasi/pelatihan PTK, dan 3) masih begitu banyak guru dengan golongan III/d atau IV/a yang terkendala proses kenaikan pangkat/golongannya karena mereka belum dapat memenuhi angka kredit dari subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, termasuk keharusan memiliki minimal satu laporan PTK.

Tiga hasil penelitian berikut perlu juga dicermati. Zulyetti (2016) mengemukakan bahwa dari beberapa hasil penelitian diidentifikasi faktor-faktor yang sebaiknya diperhatikan dalam sebuah pelatihan agar dapat dikategorikan sebagai pelatihan yang efektif, yaitu desain waktu dan metode penyampaian, materi pelatihan, evaluasi pelatihan dan program tindak lanjut. Zuyetti mengembangkan model pelatihan *in-on-in* dan hasilnya pelatihan model ini dapat memotivasi dan meningkatkan kemampuan guru untuk melaksanakan

penelitian tindakan kelas. Masrukhi *et.al* (2016) mengemukakan hasil penelitian *research and development* mereka bahwa model final pelatihan PTK berbasis pendampingan dan perangkat pelatihannya layak digunakan untuk meningkatkan profesionalitas guru matematika SMA di kabupaten Brebes. Mahfud (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan menggunakan model pelatihan berkala kemampuan guru dalam melakukan PTK berlangsung secara efektif. Hal ini dibuktikan dari proses pelatihan yang berlangsung dan hasil (produk), yakni proposal PTK dan laporan PTK yang memenuhi standar.

Kendala atau masalah yang dihadapi guru seperti diuraikan di atas perlu segera diatasi. LPMP Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu memberikan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan, dapat menyelenggarakan fasilitasi atau pelatihan PTK untuk membantu guru dalam melaksanakan PTK, atau secara lebih luas membantu guru mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan M.A. Fainaludin, S.Ag., M.M., Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat, 28 Oktober 2016 via telepon memberikan beberapa informasi penting berkaitan dengan kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan PTK. Bahwa dalam kurun waktu lebih kurang 13 tahun terakhir ini LPMP Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan PTK berbasis DIPA. Pernah ada fasilitasi yang agak berkaitan dengan PTK, yakni Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah pada tahun 2007.

Hasil wawancara di atas juga menginformasikan bahwa kegiatan yang difasilitasi oleh LPMP Provinsi Sumatera Selatan berkaitan dengan PTK bentuknya beragam, seperti workshop, bimbingan teknis (bimtek), dan pelatihan. Alokasi waktu dan pola pelatihan masing-masing kegiatan itupun beragam. Umumnya kegiatan workshop, bimtek, atau pelatihan PTK di atas merupakan kerja sama *stakeholders* dengan LPMP Provinsi Sumatera Selatan, baik atas dasar *memorandum of ourstanding* (MoU) antara pihak LPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan pihak terkait maupun tanpa MoU.

Pada sisi lain, kurikulum untuk kegiatan workshop, bimtek, atau pelatihan PTK di atas umumnya hanya berupa struktur program yang dilengkapi dengan jadwal kegiatan. Jenis materinya juga beragam. Tidak ada kegiatan pengembangan kurikulum fasilitasi yang dilakukan sebelum kegiatan workshop, bimtek, atau pelatihan PTK di atas dilaksanakan. Bahwa kegiatan pengembangan kurikulum fasilitasi yang biasanya diawali dengan *training need assessment* (TNA) terakhir dilaksanakan di LPMP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2005. Refleksi pengalaman penulis dan beberapa rekan widyaiswara LPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam membimbing guru melaksanakan PTK, baik melalui workshop, bimtek, maupun pelatihan PTK, menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda.

Uraian di atas mendasar pemikiran bahwa perlu dikembangkan fasilitasi atau pelatihan PTK untuk membantu guru dalam melaksanakan PTK. Fasilitasi yang dimaksud menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 tahun 2011, pasal 1 dan 2, sebagai fasilitasi teknis. Secara lebih khusus, fasilitasi teknis untuk guru yang dimaksud menurut pasal 6, termasuk jenis fasilitasi teknis substantif.

Hal yang sangat penting terkait penyelenggaraan fasilitasi atau pelatihan PTK itu sendiri adalah pengembangan kurikulumnya. Jabar (2011) mengemukakan bahwa program-program pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (*competency-based training*) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus yang berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau *Competency-based Curriculum*. Dengan menggunakan pendekatan KBK, unit fasilitasi yang merupakan kepanjangan pemerintah akan dapat memastikan kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan oleh lembaga/unit-unit di bawahnya, bagaimana mengukur pencapaian kompetensi yang dilatih, serta indikator-indikator apa saja yang diterapkan untuk mengetahui apakah aparat telah menguasai kompetensi yang diberikan. Oleh karena itu, proposal konsultasi fasilitasi ini

dimaksudkan untuk memberikan kajian dan pemikiran tentang perlunya pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi untuk fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan PTK.

Banyak model pengembangan kurikulum yang berkembang selama ini. Dalam proposal ini penulis membahas satu model saja yaitu model ADDIE. Apa, bagaimana, dan mengapa model ADDIE akan digunakan dalam pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi untuk fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan PTK akan dibahas dalam uraian selanjutnya.

## **B. Tujuan Penulisan Proposal**

Tujuan penulisan proposal perkonsultasian fasilitasi ini adalah memberikan masukan kepada LPMP Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi pada fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan PTK.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan proposal perkonsultasian fasilitasi ini dibatasi pada bidang konsultasi pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi. Proposal perkonsultasian fasilitasi ini membahas penerapan model ADDIE dalam rangka mengoptimalkan pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi pada fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan PTK.

## **DESKRIPSI SINGKAT LOCUS**

### **A. Visi**

Visi LPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah "Menjadi lembaga penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Sumatera Selatan yang berkarakter berlandaskan gotong royong."

### **B. Misi**

Misi LPMP Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya lembaga.
2. Mengembangkan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berkualitas.
3. Mengembangkan program pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
4. Mengembangkan program supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.
5. Mengembangkan program fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan
6. Mengembangkan program kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan.
7. Mengembangkan sistem manajemen mutu lembaga berbasis kinerja.

### **C. Motto**

Motto LPMP Provinsi Sumatera Selatan, yaitu "Melayani dengan Amanah".

### **D. Value yang Dianut Lembaga**

Nilai-nilai (*values*) utama yang dianut pada LPMP Provinsi Sumatera Selatan dalam periode 2015-2019 adalah 1) relegius, 2) profesional, dan 3) tanggung jawab.

### **E. Pegawai**

Pegawai LPMP Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan saat ini berjumlah 126 orang. Distribusi pegawai LPMP Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan golongan/ruang kepegangannya disajikan berikut ini.



## F. IDENTIFIKASI KEKUATAN PENDORONG DAN KEKUATAN PENGHAMBAT (INTERNAL DAN EKSTERNAL)

Untuk mengidentifikasi atau menganalisis faktor-faktor internal (kekuatan/*strength* dan kelemahan/*weakness*) dan faktor-faktor eksternal (peluang/*opportunity* dan ancaman/*threats*) suatu lembaga/organisasi, kita dapat menggunakan analisis SWOT. Williamson (2016) mengemukakan bahwa analisis SWOT adalah cara yang efektif untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, juga memeriksa peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi. Berikut hasil identifikasi masalah pada LPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan analisis SWOT.

KEKUATAN PENDORONG		KEKUATAN PENGHAMBAT			
<b>I N T E R N A L</b>	1. Jumlah pegawai, termasuk WI, memadai 2. Ada widyaiswara berkualifikasi S3 Pengembangan Kurikulum 3. Sarana dan prasarana fasilitasi cukup memadai 4. Dukungan DIPA LPMP tersedia 5. Komitmen pimpinan untuk fasilitasi berkualitas cukup tinggi 6. Kinerja WI/staf rata-rata sudah baik 7. Kerja sama antarstaf dan seksi/subbag sudah berjalan baik 8. Kemampuan pimpinan membangun <i>networking</i> sangat baik	<b>S</b>	1. Tidak semua WI kompeten dalam menulis dan/atau membimbing PTK 2. Pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan tidak diprogramkan, terutama pelatihan berbasis kerja sama 3. Struktur program fasilitasi/ pelatihan beragam 4. WI/staf belum diberdayakan secara optimal untuk pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan 5. Pengaturan jadwal kegiatan antar-WI sering tidak sinkron	<b>W</b>	<b>I N T E R N A L</b>
<b>E K S T E R N A L</b>	1. Adanya regulasi yang kuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2005</li> <li>PP No. 74 Tahun 2008</li> <li>PP No. 32 Tahun 2015</li> <li>Permendiknas No.16 Tahun 2007</li> <li>Permenegpan dan RB No.16 Tahun 2009</li> <li>Perka LAN No.13 Tahun 2011</li> <li>Permeneg PAN dan RB No. 22 Tahun 2014</li> <li>Permendikbud No. 14 Tahun 2015</li> </ol> 2. Peluang kemitraan lembaga dengan pemda sangat terbuka 3. Ada banyak LPTK di sekitar LPMP	<b>O</b>	1. Fasilitasi <i>given</i> dari pusat belum menjawab kebutuhan <i>stakeholders</i> 2. Banyak guru dilibatkan sebagai instruktur/fasilitator fasilitasi 3. Ada lembaga/organisasi lain yang menyelenggarakan fasilitasi/pelatihan 4. Maraknya "jual beli" karya tulis ilmiah terutama laporan PTK	<b>T</b>	<b>E K S T E R N A L</b>
KEKUATAN PENDORONG		KEKUATAN PENGHAMBAT			

Gambar 5. Identifikasi Kekuatan Pendorong dan Penghambat pada LPMP Provinsi Sumatera Selatan

## PETA DAN ANALISIS MASALAH

### A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dan menjadi tantangan bagi LPMP Provinsi Sumatera Selatan. Hasil identifikasi masalah di atas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Masalah

No.	Masalah	Keterangan
1	Tidak semua WI kompeten dalam menulis dan/atau membimbing PTK	Internal
2	Pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan tidak diprogramkan, terutama pelatihan berbasis kerja sama	Internal
3	Struktur program fasilitasi/ pelatihan beragam	Internal
4	WI/staf belum diberdayakan secara optimal untuk pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan	Internal
5	Pengaturan jadwal kegiatan antar-WI sering tidak sinkron	Internal
6	Fasilitasi <i>given</i> dari pusat belum menjawab kebutuhan <i>stakeholders</i>	Eksternal
7	Banyak guru dilibatkan sebagai instruktur/fasilitator fasilitasi	Eksternal
8	Ada lembaga/organisasi lain yang menyelenggarakan fasilitasi/pelatihan	Eksternal
9	Maraknya "jual beli" karya tulis ilmiah terutama laporan PTK.	Eksternal

Sumber: Hasil analisis

## B. Prioritas Masalah

Penetapan prioritas masalah berdasarkan hasil identifikasi permasalahan di atas menggunakan beberapa metode. Metode pertama yang digunakan adalah metode USG (*urgency, seriousness, growth*) dengan matriks USG. Kepner dan Trago (1981) dalam Asmoko (2016) menyatakan pentingnya suatu masalah dibandingkan dengan masalah lainnya dapat dilihat dari ketiga aspek tersebut. Semakin tinggi tingkat *urgency, seriousness, dan growth*, semakin tinggi skor untuk masing-masing unsur tersebut.

Untuk mengurangi tingkat subjektivitas dalam menentukan masalah prioritas, maka perlu ditetapkan kriteria untuk masing-masing unsur USG tersebut. Umumnya digunakan skor dengan skala tertentu, misalnya skor 1-5. Berikut ini hasil analisis penentuan prioritas masalah dengan menggunakan metode USG.

Tabel 2. Penentuan Prioritas Masalah dengan Metode USG

No.	Jenis Masalah	Kriteria Penilaian			Skor UxSxG	Prioritas
		U	S	G		
1	Tidak semua WI kompeten dalam menulis dan/atau membimbing PTK	3	4	4	48	2
2	Pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan tidak diprogramkan, terutama pelatihan berbasis kerja sama	5	4	3	60	1
3	Struktur program fasilitasi/ pelatihan beragam	4	4	2	32	4
4	WI/staf belum diberdayakan secara optimal untuk pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan	3	4	3	36	3
5	Pengaturan jadwal kegiatan antar-WI sering tidak sinkron	1	2	2	4	8
6	Fasilitasi <i>given</i> dari pusat belum menjawab kebutuhan <i>stakeholders</i>	2	3	3	18	6
7	Banyak guru dilibatkan sebagai instruktur/fasilitator fasilitasi	2	2	1	4	9
8	Ada lembaga/organisasi lain yang menyelenggarakan fasilitasi/pelatihan	2	3	2	12	7
9	Maraknya "jual beli" karya tulis ilmiah terutama laporan PTK	3	3	3	27	5

Sumber: Hasil analisis

Untuk memperoleh hasil perbandingan, berikut digunakan metode Hanlon (Kualitatif). Metode ini lebih efektif dipergunakan untuk masalah yang bersifat kualitatif dan

data/informasi yang tersedia pun bersifat kualitatif. Prinsip utama dalam metode ini adalah membandingkan pentingnya masalah yang satu dengan yang lainnya dengan cara “*matching*”. Langkah-langkah metode ini adalah sebagai berikut.

1. Membuat matriks masalah
2. Menuliskan semua masalah yang berhasil dikumpulkan pada sumbu vertikal dan horisontal
3. Membandingkan (*matching*) antara masalah yang satu dengan yang lainnya pada sisi kanan diagonal dengan memberi tanda (+) bila masalah lebih penting dan memberi tanda (-) bila masalah kurang penting
4. Menjumlahkan tanda (+) secara horisontal dan masukkan pada kotak total (+) horisontal
5. Menjumlahkan tanda (-) secara vertikal dan masukkan pada kotak total (-) vertikal
6. Pindahkan hasil penjumlahan pada total (-) horisontal di bawah kotak (-) vertikal
7. Jumlah hasil vertikal dan horisontal dan masukkan pada kotak total
8. Hasil penjumlahan pada kotak total yang mempunyai nilai tertinggi adalah urutan prioritas masalah (Intiasari, 2011).

Berikut ini hasil analisis penentuan prioritas masalah dengan menggunakan metode Hanlon (Kualitatif).

Tabel 3. Penentuan Prioritas Masalah dengan Metode Hanlon (Kualitatif)

Masalah	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Total Horisontal (+)
A		-	-	+	+	+	+	+	+	6
B			+	+	+	+	+	+	+	7
C				-	+	+	-	-	+	3
D					+	+	+	+	-	4
E						-	+	-	-	1
F							+	+	+	3
G								+	+	2
H									-	0
I										0
<b>Total Vertikal (-)</b>	0	0	1	1	0	1	1	2	3	
<b>Total Horisontal (+)</b>	6	7	3	4	1	3	2	0	0	
<b>Total</b>	6	7	4	5	1	4	3	2	3	
<b>Prioritas Masalah</b>	II	I	IV	III	IX	V	VI	VIII	VII	

Sumber: Hasil analisis

Keterangan:

- A = Tidak semua WI kompeten dalam menulis dan/atau membimbing PTK
- B = Pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan tidak diprogramkan, terutama pelatihan berbasis kerja sama
- C = Struktur program fasilitasi/ pelatihan beragam
- D = WI/staf belum diberdayakan secara optimal untuk pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan
- E = Pengaturan jadwal kegiatan antar-WI sering tidak sinkron
- F = Fasilitasi *given* dari pusat belum menjawab kebutuhan *stakeholders*
- G = Banyak guru dilibatkan sebagai instruktur/fasilitator fasilitasi
- H = Ada lembaga/organisasi lain yang menyelenggarakan fasilitasi/pelatihan
- I = Maraknya “jual beli” karya tulis ilmiah terutama laporan PTK

Berdasarkan hasil analisis prioritas masalah melalui metode USG dan Hanlon (Kualitatif) maka masalah yang menjadi prioritas adalah “pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan tidak diprogramkan, terutama pelatihan berbasis kerja sama”. Masalah ini terutama berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitasi atau pelatihan PTK yang pernah dilakukan.

### C. Analisis Masalah

Analisis masalah dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, sebagai salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan dalam pemilihan strategi dasar (Rangkuti, 2006). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Penetapan strategi berdasarkan hasil analisis SWOT disajikan dalam gambar berikut.

	<b>Opportunities</b> (external, positive)	<b>Threats</b> (external, negative)
<b>Strengths</b> (internal, positive)	<b>Strength-Opportunity strategies</b>  Which of the company's strengths can be used to maximize the opportunities you identified?	<b>Strength-Threats strategies</b>  How can you use the company's strengths to minimize the threats you identified?
<b>Weaknesses</b> (internal, negative)	<b>Weakness-Opportunity strategies</b>  What action(s) can you take to minimize the company's weaknesses using the opportunities you identified?	<b>Weakness-Threats strategies</b>  How can you minimize the company's weaknesses to avoid the threats you identified?

Gambar 6. Matriks Strategi Umum berdasarkan Analisis SWOT (Berry, 2016)

<b>INTERNAL FACTORS</b>	<p><b>STRENGTHS:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pegawai, termasuk WI, memadai</li> <li>2. Ada widyaiswara berkualifikasi S3 Pengembangan Kurikulum</li> <li>3. Sarana dan prasarana fasilitasi cukup memadai</li> <li>4. Dukungan DIPA LPMP tersedia</li> <li>5. Komitmen pimpinan untuk fasilitasi berkualitas cukup tinggi</li> <li>6. Kinerja WI/staf rata-rata sudah baik</li> <li>7. Kerja sama antarstaf dan seksi/subbag sudah berjalan baik</li> <li>8. Kemampuan pimpinan membangun <i>networking</i> sangat baik</li> </ol>	<p><b>WEAKNESSES:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak semua WI kompeten dalam menulis dan/atau membimbing PTK</li> <li>2. Pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan tidak diprogramkan, terutama pelatihan berbasis kerja sama</li> <li>3. Struktur program fasilitasi/pelatihan beragam</li> <li>4. WI/staf belum diberdayakan secara optimal untuk pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan</li> <li>5. Pengaturan jadwal kegiatan antar-WI sering tidak sinkron</li> </ol>
<b>EXTERNAL FACTORS</b>	<p><b>STRATEGI S-O:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman tentang regulasi terkait</li> <li>2. Memperbanyak kemitraan LPMP dengan Pemda dan LPTK</li> </ol>	<p><b>STRATEGI W-O:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kompetensi WI dalam menulis dan/atau membimbing PTK</li> <li>2. Mengembangkan kurikulum fasilitasi/ pelatihan yang berbasis kerja sama atau kemitraan, terutama pelatihan PTK</li> <li>3. Mengoptimalkan peran WI/staf dalam pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan</li> <li>4. Meningkatkan koordinasi antar-WI</li> </ol>
	<p><b>OPPORTUNITIES:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya regulasi yang kuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2005</li> <li>b. PP No. 74 Tahun 2008</li> <li>c. PP No. 32 Tahun 2015</li> <li>d. Permendiknas No.16 Tahun 2007</li> <li>e. Permenegpan dan RB No.16 Tahun 2009</li> <li>f. Perka LAN No.13 Tahun 2011</li> <li>g. Permeneg PAN dan RB No. 22 Tahun 2014</li> <li>h. Permendikbud No. 14 Tahun 2015</li> </ol> </li> <li>2. Peluang kemitraan lembaga dengan pemda sangat terbuka</li> <li>3. Ada banyak LPTK di sekitar LPMP</li> </ol>	

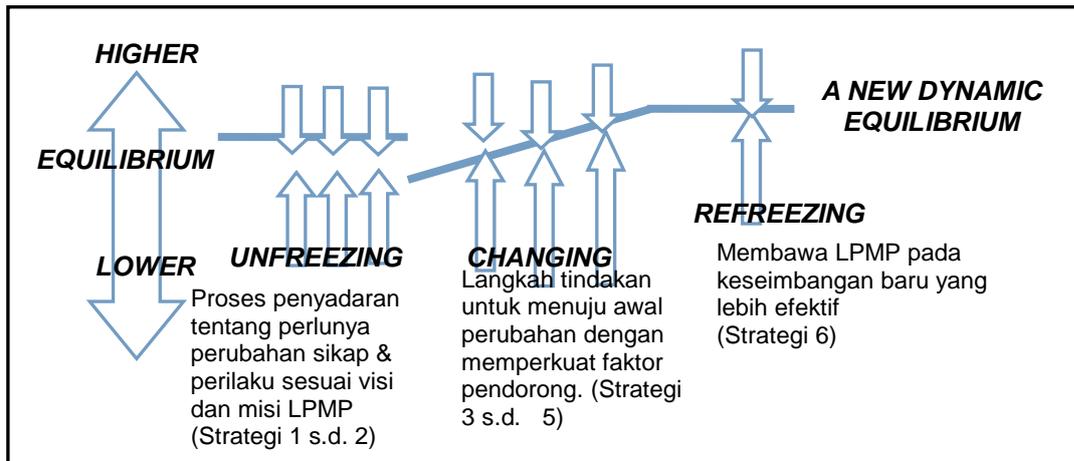
<b>THREATS:</b>	<b>STRATEGI S-T:</b>	<b>STRATEGI W-T:</b>
1. Fasilitasi <i>given</i> dari pusat belum menjawab kebutuhan <i>stakeholders</i> 2. Banyak guru dilibatkan sebagai instruktur/ fasilitator fasilitasi 3. Ada lembaga/ organisasi lain yang menyelenggarakan fasilitasi/pelatihan 4. Maraknya "jual beli" karya tulis ilmiah terutama laporan PTK	1. <b>Memberdayakan WI bersama guru sebagai fasilitator fasilitasi/ pelatihan</b> 2. <b>Meningkatkan kualitas fasilitasi yang diselenggarakan LPMP</b> 3. <b>Menggalakkan kampanye anti plagiarisme</b>	1. <b>Melakukan kajian tentang praktik plagiarisme</b> 2. <b>Memperbanyak penyamaan persepsi tentang penulisan dan/atau pembimbingan PTK</b> 3. <b>Mengkaji perlunya sinkronisasi penjadwalan tugas WI</b>

Gambar 7. Analisis SWOT pada LPMP Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas dirancang *grand strategy* yang secara umum menggunakan kekuatan (*strengths*) dan memanfaatkan peluang (*opportunities*). *Grand strategy* yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan pemahaman tentang regulasi terkait
2. Memperbanyak kemitraan LPMP dengan Pemda dan LPTK
3. Meningkatkan kompetensi WI dalam menulis dan/atau membimbing PTK
4. Mengembangkan kurikulum fasilitasi/ pelatihan yang berbasis kerja sama atau kemitraan, terutama pelatihan PTK
5. Mengoptimalkan peran WI/staf dalam pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan
6. Meningkatkan koordinasi antar-WI

Gambaran mengenai implementasi *grand strategy* di atas dapat dilihat dalam bagan berikut ini.



Sumber: Modifikasi dari Wirapradja (2016)

Gambar 8. *Grand Strategy*

#### D. Rekomendasi Penyelesaian

Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan yang tidak diprogramkan, terutama pelatihan PTK berbasis kerja sama antara LPMP Provinsi Sumatera Selatan dengan *stakeholders* dengan ini direkomendasikan beberapa hal berikut.

1. Perlu kegiatan pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan, terutama pelatihan PTK, sehingga LPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki kurikulum fasilitasi/pelatihan PTK yang baku/standar.
2. Pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan PTK di atas dapat menerapkan model ADDIE. Penerapan model ADDIE diharapkan mengoptimalkan pengembangan kurikulum fasilitasi/pelatihan berbasis kompetensi paa fasilitasi peningkatan kometensi guru dalam melaksanakan PTK

## RENCANA TINDAK PERKONSULTASIAN

### A. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan perkonsultasian fasilitasi terkait dalam proposal ini adalah pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi. Kegiatan perkonsultasian fasilitasi yang dimaksud terkait dengan penerapan model ADDIE dalam rangka mengoptimalkan pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi pada fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas.

### B. Alasan Pemilihan Kegiatan

Jenis kegiatan di atas dipilih dengan beberapa alasan berikut.

1. Pengembangan kurikulum fasilitasi menjadi bagian integral dan sangat penting untuk melancarkan dan mensukseskan suatu kegiatan fasilitasi/pelatihan.
2. Model ADDIE dipilih dengan pertimbangan bahwa model ini cukup sederhana dan praktis dalam pengembangan kurikulum fasilitasi.
3. Penerapan model ADDIE dalam pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi pada fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan PTK diharapkan dapat lebih mengoptimalkan hasil pengembangan kurikulum fasilitasinya.

### C. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi pada fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan PTK adalah kampus LPMP Provinsi Sumatera Selatan.

### D. Waktu

Pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi pada fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan PTK direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu November-Desember 2016.

### E. Pihak yang Terlibat

Dalam kegiatan pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi pada fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan PTK, pihak yang terlibat direncanakan seperti tabel berikut.

Tabel 4. Kerangka Tim Pengembangan Kurikulum Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Guru dalam Melaksanakan PTK

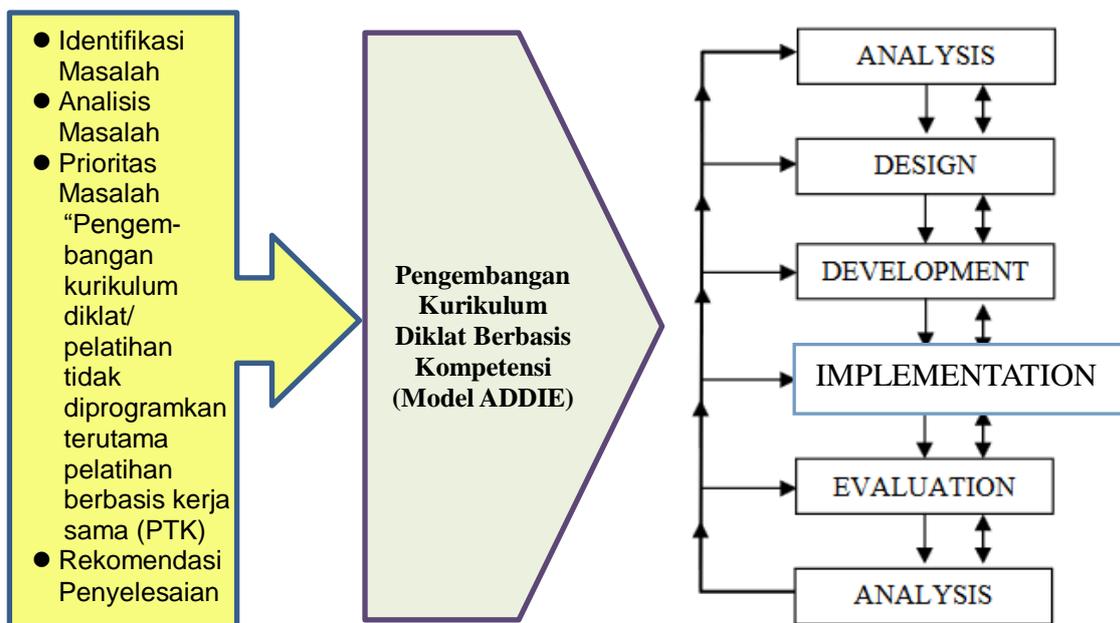
No.	Struktur Tim Pengembang Kurikulum Fasilitasi	Personalia/Keterangan
A	Pengarah	1. Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan 2. Kasubbag Umum 3. Kasi FPMP 4. Kasi SI 5. Kasi PMS
B	Narasumber	WI/Dosen (Pakar Pengembangan Kurikulum Fasilitasi)
C	Ketua	Koordinator Widyaiswara
D	Sekretaris	WI
E	Anggota	Seluruh WI
F	Pembantu Umum	Staf Sekretariat Koordinatoriat WI

### F. Tahapan Kegiatan

ADDIE merupakan sebuah model *Instructional System Design* (ISD) yang telah ada sejak awal 1950-an. ADDIE meliputi lima tahap, yaitu *analysis, design, development,*

*implement*, dan *evaluate*. Model ini diadaptasi dari beberapa referensi antara lain Dick and Carey (2004) dan Kemp (Gustafson, K., and Branch, R.M., 1997) (dalam Clark, 2015). Model ADDIE dapat menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan atau pembelajaran yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri dengan beberapa tahapan.

Untuk lebih memberikan gambaran mengenai rencana tindak perkonsultasian fasilitasi ini, berikut disajikan bagan yang menunjukkan model kerangka berpikirnya.



Gambar 9. Model Berpikir Pengembangan Kurikulum Fasilitasi (Grafinger, D.J.,1998)

Tahapan penerapan model ADDIE diuraikan sebagai berikut.

### 1. **Analysis**

Kegiatan ini meliputi analisis kebutuhan fasilitasi yang dilakukan melalui *training need assessment* (TNA). Untuk lebih mengoptimalkan hasil TNA, maka instrumen yang digunakan dapat berupa a) Soal berbentuk pilihan ganda (4 option), dan b) Angket semi terbuka (ada pertanyaan/pernyataan dengan 4 option dan disertai alasan). Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan hasil analisis kebutuhan fasilitasi, sebagai dasar pengembangan kurikulum fasilitasi.

### 2. **Design**

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan fasilitasi, dilakukan pengembangan kurikulum fasilitasi. Kurikulum yang akan dikembangkan minimal meliputi:

- a. Tujuan
- b. Sasaran
- c. Deskripsi fasilitasi
- d. Silabi masing-masing materi fasilitasi
- e. Metode fasilitasi

### 3. **Development**

Kegiatan ini meliputi pengembangan modul/bahan fasilitasi, GBPP/RBPMD dan SAP/RP.

### 4. **Implementation**

Kegiatan ini berupa pelaksanaan implementasi hasil pengembangan kurikulum fasilitasi dalam kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan penelitian

tindakan kelas.

### 5. Evaluate

Kegiatan ini berupa evaluasi terhadap pelaksanaan implementasi hasil pengembangan kurikulum fasilitasi dalam kegiatan fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas. Evaluasi ini merupakan evaluasi secara komprehensif mulai dari tahap analysis hingga tahap implementation.

Untuk lebih jelasnya, rencana tindak konsultasi dilakukan melalui tahap kegiatan yang disajikan dalam Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5. Tahapan Kegiatan Rencana Tindak Konsultasi

No	Kegiatan	Output	Stakeholder	Waktu
1	Presentasi proposal perkonsultasian fasilitasi untuk mendapat masukan dan persetujuan	Kesepakatan perkonsultasian	Kepala LPMP, Kasubbag dan Kasi	Minggu II November 2016
2	FGD dan penyempurnaan proposal perkonsultasian fasilitasi	Masukan proposal perkonsultasian	Kasubag umum Kasi, Koorwi	Minggu II November 2016
3	Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Fasilitasi (TPKF)	SK tentang TPKF	Kepala LPMP	Minggu II November 2016
4	Pengembangan Kurikulum Fasilitasi Berbasis Kompetensi (Pelatihan PTK)			Minggu III November s.d. Minggu III Desember 2016
	a. <b>Analysis</b>	Dokumen hasil analisis kebutuhan fasilitasi (AKF)	TPKF	
	b. <b>Design</b>	Kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi	TPKF	
	c. <b>Development</b>	Modul/bahan fasilitasi, GBPP/RBPMD dan SAP/RP	TPKF	
	d. <b>Implementation</b>	Laporan pelaksanaan fasilitasi berbasis kompetensi	TPKF	
	e. <b>Evaluation</b>	Laporan evaluasi pengembangan kurikulum dan pelaksanaan fasilitasi berbasis kompetensi	Kasi FPMP dan/atau TPKF	
5	Review/revisi kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi	Laporan hasil review/revisi kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi	TPKF	2017

#### **Keterangan:**

- AKF adalah proses penelitian/kajian ilmiah untuk menentukan jenis-jenis fasilitasi yang dibutuhkan dalam rangka mengisi kesenjangan kompetensi.
- Laporan AKF: pendahuluan, tinjauan pustaka (teori dan peraturan perundang-undangan), instrumen AKF, hasil AKF, dan penutup.
- Kurikulum fasilitasi adalah seperangkat rencana dan pengaturan fasilitasi yang berisi tujuan, sasaran, deskripsi fasilitasi, silabi masing-masing mata fasilitasi, serta metode fasilitasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
- Modul fasilitasi adalah bahan fasilitasi yang merupakan unit terkecil dari sebuah mata fasilitasi, disusun secara sistematis yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.

#### **F. Kendala**

Beberapa kendala yang mungkin akan dihadapi dalam kegiatan perkonsultasian fasilitasi ini, antara lain adalah:

1. Ketersediaan waktu yang cukup bagi pejabat terkait (Kepala, Kasubbag, dan/atau Kasi)
2. Ketersediaan alokasi anggaran pada LPMP Provinsi Sumatera Selatan

#### **G. Alternatif Solusi**

Untuk mengatasi kemungkinan adanya kendala terhadap pelaksanaan perkonsultasian fasilitasi di atas, beberapa alternatif upaya solusi berikut ini dapat dijadikan bahan antisipasi, yaitu:

1. Melakukan komunikasi awal dengan Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan tentang ketersediaan waktu untuk perkonsultasian fasilitasi
2. Melakukan kegiatan perkonsultasian fasilitasi melalui audiensi atau rapat pada jam kerja yang disepakati secara efektif dan efisien
3. Melakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPMP Provinsi Sumatera Selatan untuk mengalokasikan biaya perkonsultasian fasilitasi

#### **H. Output**

*Output* yang dapat dihasilkan dari perkonsultasian fasilitasi ini adalah:

1. Dokumen persetujuan proposal konsultasi fasilitasi
2. Dokumen kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi pada fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan PTK

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rencana kegiatan perkonsultasian fasilitasi dalam bentuk proposal konsultasi fasilitasi ini dapat dijadikan bahan masukan kepada LPMP Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi pada fasilitasi peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan PTK. Pengembangan kurikulum fasilitasi yang akan dilakukan menggunakan model ADDIE.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan pengajuan proposal perkonsultasian fasilitasi ini adalah sebagai berikut.

1. Perlu adanya perhatian, dukungan, dan komitmen bersama dari Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan dan jajarannya bersama widyaiswara untuk mendukung kegiatan perkonsultasian fasilitasi ini dengan sungguh-sungguh.
2. Perlu adanya dukungan dan komitmen dari seluruh pejabat yang akan menjadi *stakeholders* baik yang langsung maupun yang tidak langsung untuk dapat mengikuti proses perkonsultasian fasilitasi ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya dukungan pendanaan dari Bagian Perencanaan dan Pembendaharaan

untuk mengalokasikan anggaran biaya guna menunjang kegiatan pengembangan kurikulum fasilitasi berbasis kompetensi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmoko, Hindri. 2016. *Teknik Analisis Permasalahan–Menentukan Masalah Prioritas*, tersedia dalam [http://www.bppk.depkeu.go.id/bdpimmagelang/images/unduh/menentukan\\_prioritas.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/bdpimmagelang/images/unduh/menentukan_prioritas.pdf) diakses 29 Oktober 2016.
- Basuki J, dan Entang, M. 2006. *Teknik Konsultasi Fasilitasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Basuki J, dan Entang, M. 2006. *Praktik Konsultasi Fasilitasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Berry, Tim. 2016. *What Is a SWOT Analysis?* tersedia dalam <http://articles.bplans.com/how-to-perform-swot-analysis/> diakses 29 Oktober 2016.
- Clark, Donald. 2015. *ADDIE Model*, tersedia dalam [http://www.nwlink.com/~donclark/history\\_isd/addie.html](http://www.nwlink.com/~donclark/history_isd/addie.html) diakses 25 Oktober 2016.
- Grainger, D.J. 1998. *Basic of Instructional Systems Development*, INFO-LINE Issue 8803 Alexandraxandria, V.A., American Society for Training and Development.
- Intiasari, Arih Diyaning. 2011. *Menetapkan Prioritas Masalah*, tersedia dalam <http://budidarma.com/2011/06/menetapkan-prioritas-masalah.html> diakses 29 Oktober 2016.
- Jabar, Cipi Safruddin Abd. 2011. *Desain Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (Pengembangan Fasilitasi Sistemik Model ADDIE)*. Makalah Seminar Penyusunan Draft Desain Kurikulum Fasilitasi Manajemen Perkantoran pada Badan Fasilitasi Propinsi DI Yogyakarta tanggal 25 Mei 2011, tersedia dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/BAHAN%20SEMINAR%20PENYUSUNAN%20DRAF%20KURIKULUM%20PELATIHAN.pdf> diakses 29 Oktober 2016.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Buku 4 Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- LPMP Sumatera Selatan. 2016. *Rencana Strategis LPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019*. Indralaya: LPMP Provinsi Sumatera Selatan.
- Mahfud. 2015. *Efektivitas Penerapan Model Pelatihan Berkala untuk Peningkatan Profesionalisme Guru dalam Melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)*, tersedia dalam <http://bdksemarang.kemenag.go.id/efektivitas-penerapan-model-pelatihan-berkala-untuk-peningkatan-profesionalisme-guru-dalam-melakukan-penelitian-tindakan-kelas-ptk/> diakses 27 Oktober 2016.
- Masrukhi, Joko Widodo, dan Tri Joko Raharj. 2016. *Pengembangan Model Pelatihan PTK Berbasis Pendampingan untuk Meningkatkan Profesionalitas Guru Matematika SMA di Kabupaten Brebes*, tersedia dalam <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/Cakrawala/article/view/388> diakses 27 Oktober 2016.
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara.
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Rangkuti. 2006. *Analisis SWOT sebagai Alat Perumusan Strategi*, tersedia dalam <https://arulmtp.wordpress.com/2008/08/03/analisa-swot-sebagai-alat-perumusan-strategi/> diakses 28 Oktober 2016.
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Wirapradja, Nana Rukmana D. 2016. *Teknik Konsultasi Fasilitasi Pembekalan untuk*

*Praktik Konsultasi. Bahan Tayang Fasilitasi Fungsional Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Utama, tanggal 19 Oktober s.d. 1 November 2016.*  
Zulyetti. 2016. *Penerapan Fasilitasi In-On-In untuk Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Melakukan Penelitian Tindakan Kelas*, tersedia dalam <http://lmpriau.go.id/?p=771> diakses 27 Oktober 2016.